

1315/11 - Nov 2

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HASIL
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILU 1999 DI
PROPINSI SUMATERA BARAT**

(Studi analisis hasil Pemantauan Pemilu APPI SUMBAR)

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**HENDRISYA
95 140 092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

No. Reg : 994/PKVII/VIII-2000

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HASIL PELAKSANAAN
PEMANTAUAN PEMILU 1999 DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

ABSTRAK

Pemilihan umum 1999 merupakan gerbang menuju civil society guna berjalannya demokratisasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa diawal tahun 1997. Sejarah telah membuktikan bahwa pemilu sebelumnya merupakan legitimasi semu yang diperoleh oleh penguasa pada rezim Orde Baru yang dimotori oleh Soeharto. Untuk memperbaiki hal ini tidak semudah membalik telapak tangan apalagi 32 tahun dibawah kepemimpinan otoritarian yang menyebabkan hancurnya demokrasi sehingga terjadinya perlawanan rakyat. Pada pemilu kali ini banyak hal-hal baru yang merupakan cerminan mulainya berjalan demokrasi secara bertahap diantaranya : kehadiran pemantau pemilu independen dalam pelaksanaan pemiluhan umum guna memantau jalannya pemilihan umum yang jujur, adil dan luber yang akuntabilitasnya dapat diterima oleh masyarakat banyak, serta perubahan Undang-Undang politik yang ada merupakan suatu prestasi guna meningkatkan pemahaman dan kepemilikan rakyat terhadap negeri ini, kebebasan yang bertanggung jawab disegala bidang dan kritikan terhadap penguasa merupakan hal yang halal, kebebasan pers yang selama ini sering diabaikan sebagai kontrol sosial selain institusi yang ada.

Berangkat dari inilah diharapkan pemilu 1999 merupakan awal dari demokrasi menuju masyarakat madani sesuai dengan cita-cita konstitusi , pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV "menuju masyarakat adil dan makmur ".

Dengan adanya pemilu 1999 ini diharapkan masyarakat semakin sadar dengan hak politiknya dan mampu memperjuangkan kepentingan mereka guna berjalannya demokrasi disegala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu tahun 1999 adalah sebagai gerbang menuju Indonesia Baru memerlukan dukungan dan perhatian serius komponen bangsa yang menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasca Pemilu. Sehingga pemilu yang dilaksanakan, semaksimal mungkin harus mampu melaksanakan aspirasi rakyat, seiring dengan demokratisasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa bersama rakyat yang menentang pemerintahan otoritarian Soeharto selama 32 tahun.

Turunnya Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 menandakan dimulainya era reformasi. Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan diadakannya pemilihan umum dan perubahan terhadap undang-undang politik yang ada sehingga lahirnya undang-undang politik yang baru yaitu :

1. Undang-undang No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik
2. Undang-undang No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR dan DPRD.

Dalam Undang –undang No.5 tahun 1985 bahwa partai politik yang ikut dalam pemilihan umum ada 3 partai tetapi dalam undang-undang No.3 tahun 1999 diberikan kebebasan sehingga banyak muncul partai-partai baru yang kemudian ditetapkan sebanyak 48 partai oleh KPU(Komisi Pemilihan Umum)sebagai penyelenggara Pemilihan Umum menurut Undang-undang No.3 tahun 1999 pasal 8 ayat 2.

Dan ini merupakan pemilihan umum pertama yang diadakan pada era reformasi yang demokratis sehingga hasil pemilu dapat diterima berbagai pihak, dilaksanakan secara jujur dan adil, apalagi begitu banyaknya partai politik yang ikut merupakan fenomena tersendiri, disinilah perlunya pengamat (observe) yang lebih dikenal dengan Pemantau Pemilu. Sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-undang No.3 tahun 1999 dan keputusan KPU No. 12 tahun 1999 yang berfungsi untuk memantau tahapan-tahapan proses pelaksanaan dalam pemilu yang terdiri dari :

1. Proses pendaftaran pemilih pada tanggal 5 April sampai tanggal 4 Mei 1999 yang diatur dalam pasal 32,33,34,35,36,37,38.undang-undang No.3 tahun 1999
2. Masa kampanye pada tanggal 19 Mei samapi tanggal 4 Juni 1999 yang diatur dalam ketentuan pasal 46,47,48,49.undang-undang No.3 tahun 1999
3. Pencoblosan pada tanggal 7 Juni 1999

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari sebuah skripsi adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian – uraian pada bab sebelumnya, serta saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Setelah membaca dan mencermati isi bab terdahulu, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam pemilihan umum tahun 1999 di Sumatera Barat secara kelembagaan terlihat bahwa institusi penyelenggara pemilu tidak sepenuhnya siap dalam melaksanakan pemilu. Perubahan sistem pemilu dimana partai yang menjadi penyelenggara pemilu berakibat belum terbangunnya sistem secara jelas dan koordinatif.
2. Panitia pemilihan daerah baik di tingkat wilayah maupun ditingkat kabupaten bekerja sangat lamban dalam menentukan aturan main dan kurangnya informasi pemilu yang diterima masyarakat serta kinerja petugas pendaftaran pemilih (gastarlih) yang lemah menjadi suatu kendala tersendiri. Disamping itu, kualitas sumberdaya manusia yang duduk didalam berbagai badan tersebut, khususnya ditingkat KPPS kurang profesional sehingga memperlambat kerja penyelenggara pemilu. Pengangkatan anggota badan tersebut kurang selektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Urbaningrum, 1999, *Ranjau-Ranjau Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dhurorudin Mashad, 1999, *Korupsi Politik, Pemilu & Legitimasi Pasca Orde Baru*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Eep Saefulloh Fatah, 1998, *Bangsa Saya Yang Menyebalkan*, PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung.
- Emha Ainun Najib, 1998, *Saat-Saat Terakhir Bersama Suharto*, Percetakan Bigraf, Yogyakarta.
- Indria Samego, 1998, *Menata Negara Usulan Lipi Tentang RUU Politik*, Penerbit Mizan, Bandung.
- H.Iman Sudarwo Padmosugondo, 1988, *Lima Undang-undang Bidang Pembangunan Politik*, Penerbit Indah, Surabaya.
- H.Hartono Mardjono, 1996, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Marsono, 1996, *Pemilu 1997 Pedoman, peraturan dan Pelaksanaan* Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Rendra, 2000, *Rakyat Belum Merdeka*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Zaim Saidi, 1998, *Suharto Menjaring Matahari Tarik Ulu Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca-1980*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Jurnal Demokrasi & HAM No.1, Mei-Agustus 2000, Penerbit The Institute for Democracy and Human Right, The Habibie Center (IDH-THC).
- Final Report Hasil Pemantauan Pemilu 1999 APPI SUMBAR.
- Final Repor Hasil Pemantauan UNFREL SUMBAR.
- Final Report Hasil Pemantauan KIPP SUMBAR.
- Final Report Hasil Pemantauan FORUM REKTOR SUMBAR.